

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga terdapat berbagai macam jenis ekosistem didalamnya. Kondisi geografis yang terletak pada garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia menjadi rumah bagi tumbuhnya berbagai macam jenis flora dan pepohonan besar. Alam menjadi salah satu elemen kehidupan yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam menjaga dan melestarikannya agar tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan. Salah satu bentuk dalam upaya melestarikan lingkungan sekitar dan menjaga ekosistem yang ada adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dapat teruraikan oleh alam, namun dalam batas kapasitas kemampuan alam dalam menguraikannya. Selain itu, salah satu jenis sampah yakni sampah plastik, membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai sehingga mampu mengganggu ekosistem lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik.

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan global sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif. Perlu adanya kerjasama dari berbagai stakeholder mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah (DLH), akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah juga masyarakat (sampit.prokal.com). Hal ini sejalan dengan hadirnya SDGs (Suistanable

Development Goals) sebagai langkah global dalam melindungi lingkungan yang melibatkan berbagai pihak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada kurun waktu 15 tahun yang dimulai dari tahun 2016 hingga 2030. Salah satu tujuan dalam menjaga ekosistem lingkungan sekitar berada pada urutan ke-15 yakni, menjaga ekosistem darat. Tujuan ini meliputi melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat serta membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.

Indonesia sendiri menjadi negara yang darurat akan sampah terutama sampah plastik (nasional.sindonews.com), sehingga dalam upaya penyelesaiannya, sampah harus tertangani dengan bijak agar tidak mengganggu ekosistem lingkungan di sekitarnya. Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya (katadata.co.id). Merujuk pada data *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) tahun 2017, menunjukkan bahwa sampah daur ulang sebesar 7%, sementara sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) sebesar 69%, dan 24% sisanya adalah sampah illegal dumping karena sampah dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target dalam upaya penanganan sampah yakni sampah yang dikelola 100% , dengan pengurangan sampah sebesar 30% yang meliputi mencegah penumpukan sampah, daur ulang sampah, dan

pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan sebesar 70% sisanya adalah target penanganan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga agar pengelolaan sampah nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dilakukan mulai dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah (UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah perkotaan antara lain kepadatan dan penyebaran penduduk, karakteristik lingkungan sosial ekonomi, timbunan dan karakteristik sampah, sikap dan perilaku (budaya) masyarakat, jarak sumber sampah ke tempat pembuangan akhir, rencana tata ruang dan pengembangan kota, sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah, biaya, serta peraturan daerah setempat.

Salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah yang sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi yang melayani wilayah hinterland adalah Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus sendiri berada di wilayah Jawa Tengah

dengan kondisi geografis yang terletak pada persimpangan jalur transportasi utama Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Grobogan. Industri menjadi faktor penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus dan didominasi oleh industri rokok, konveksi, dan kertas. Limbah industri yang dihasilkan oleh berbagai pabrik industri, baik berupa limbah cair maupun padat dapat merusak kelestarian lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan data dari website resmi Kabupaten Kudus, Dinas Perindagkop pada tahun 2014 mencatat terdapat 12.938 buah perusahaan industri/unit usaha di Kabupaten Kudus, baik industri yang besar/sedang maupun industri kecil/rumah tangga. Banyaknya industri yang ada di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa limbah industri dan sampah produk yang dihasilkan juga besar.

Disamping sektor industri yang menjadi penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus, sektor perdagangan juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus tahun 2014, terdapat 53 pasar modern, 6 pasar daerah, 22 pasar desa, dan 2 pasar hewan. Jumlah tersebut adalah jumlah yang cukup besar apabila dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, atau rata-rata setiap kecamatan memiliki sekitar 3 sampai 4 buah pasar. Hal ini menyebabkan jumlah produksi sampah yang bersumber dari pasar mencapai angka 30.78% (sipsn.menlhk.go.id/). Kabupaten Kudus menempati posisi kedua dengan kategori sumber sampah yang berasal dari sampah pasar

tradisional diantara daerah wilayah perbatasan Kabupaten Kudus. Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1.
Data Sumber Sampah Menurut Wilayah Daerah Perbatasan Kabupaten Kudus Periode 2017-2018

Kabupaten	Persentase Timbunan Sampah						
	Rumah Tangga	Kantor	Pasar Tradisional	Pusat Perniagaan	Fasilitas Publik	Kawasan	Lain
Jepara	75.55%	1.64%	14.48%	2.19%	2.17%	2.15%	1.82%
Pati	67.57%	2.93%	21.51%	4.00%	1.70%	1.00%	1.30%
Demak	50.00%	20.00%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%
Kudus	48.70 %	2.93 %	30.78%	1.85%	7.83%	2.27 %	5.63 %
Grobogan	14.07%	0.76%	51.44%	0.13%	0.27%	0.00%	0.00%

Sumber : <http://sipsn.menlhk.go.id/>

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sumber sampah yang dihasilkan oleh sektor rumah tangga, Kabupaten Jepara menempati posisi pertama sebesar 75,55% dan posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Pati sebesar 65,57%. Kemudian pada sektor kantor, Kabupaten Demak menempati posisi pertama sebesar 20,00% dan posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus dengan persentase yang sama yakni, 2,93%. Pada sektor pasar tradisional sendiri, Kabupaten Grobogan menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 51,44% dan urutan kedua ditempati oleh Kabupaten Kudus dengan persentase sebesar 30,78%. Selanjutnya, sampah yang dihasilkan oleh sektor fasilitas publik, Kabupaten Kudus menempati posisi pertama dengan persentase sebesar 7,83% .

Banyaknya produksi sampah yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan penyebarannya. Peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat (kompasiana.com).

Berikut data kepadatan dan penyebaran jumlah penduduk menurut wilayah perbatasan Kabupaten Kudus.

Tabel 1.2.
Data Kepadatan Penduduk Menurut Wilayah Perbatasan Kabupaten Kudus Tahun 2020

Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)
Kabupaten Grobogan	2013.86	1.453.526	721,76
Kabupaten Pati	1489.19	1.324.188	889,20
Kabupaten Kudus	425.15	849.184	1997,37
Kabupaten Jepara	1059.25	1.184.947	1118,66
Kabupaten Demak	900.12	1.203.956	1337,55

Sumber : *jateng.BPS.go.id*

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kudus menempati posisi pertama wilayah padat penduduk dengan kepadatan penduduk sebesar 1997,37 jiwa/ km². Kemudian disusul oleh Kabupaten Demak dengan kepadatan penduduk sebesar 1337,55 jiwa/ km², Kabupaten Jepara 1118,66 jiwa/ km², Kabupaten Pati 889,20 jiwa/ km², dan Kabupaten Grobogan sebesar 721,76 jiwa/ km².

Kepadatan penduduk pada suatu wilayah mampu menjadi penentu besar kecilnya produksi sampah yang dihasilkan oleh wilayah tersebut yang juga berpengaruh terhadap tingkat timbulan sampah yang dihasilkan. Kabupaten Kudus menempati posisi dua besar rasio timbulan sampah berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk luas wilayah menurut wilayah perbatasan Kabupaten Kudus tahun 2020. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada data berikut.

Tabel 1.3.
Rasio Timbulan Sampah Menurut Wilayah Perbatasan Kabupaten Kudus Tahun 2020.

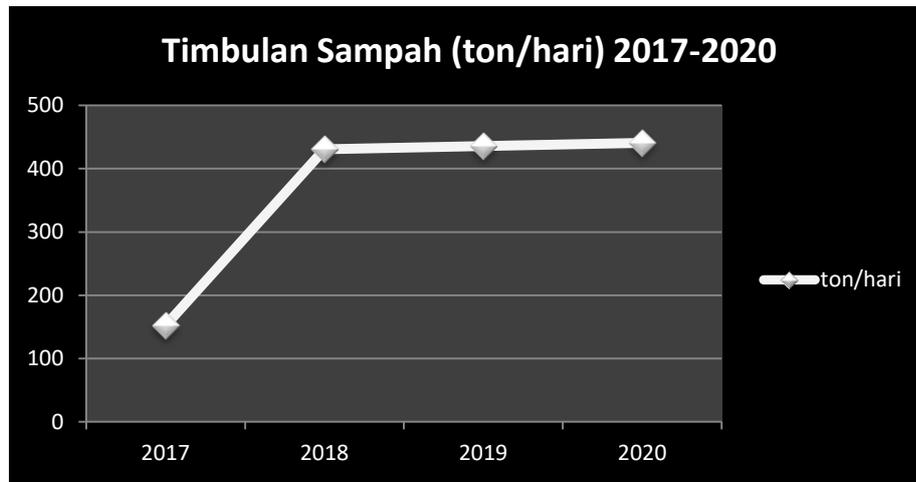
Kabupaten / Kota	Rasio Timbulan sampah/Jumlah penduduk (ton/jiwa)	Rasio Timbulan sampah/Luas Wilayah (ton/km ²)
Kab. Grobogan	1: 0,185	1: 133,964
Kab. Pati	1: 0,180	1: 160,530
Kab. Kudus	1: 0,189	1: 378,511
Kab. Jepara	1: 0,214	1: 240,187

Sumber : jateng.BPS.go.id dan sipsn.menlhk.go.id

Berdasarkan perhitungan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah timbulan sampah terbanyak berdasarkan jumlah penduduk adalah Kabupaten Jepara yakni sebesar 0,214 ton/jiwa. Kemudian disusul oleh Kabupaten Kudus sebesar 0,189 ton/jiwa, Kabupaten Grobogan 0,185 ton/jiwa, dan Kabupaten Pati sebesar 0,180 ton/jiwa. Sedangkan jumlah timbulan sampah terbanyak berdasarkan luas wilayah yang dimiliki adalah Kabupaten Kudus yakni, sebesar 378,511 ton/km². Kemudian disusul oleh Kabupaten Jepara sebesar 240,187 ton/km², Kabupaten Pati 160,530 ton/km², dan Kabupaten Grobogan sebesar 133,964 ton/km².

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa Kabupaten Kudus menghasilkan timbulan sampah sebesar 160,924.12 ton pada tahun 2020. Tercatat pula bahwa jumlah timbulan sampah (ton/hari) di Kabupaten mengalami kenaikan sejak tahun 2017-2020. Berikut data timbulan sampah Kabupaten Kudus tahun 2017-2020.

Gambar 1.1.
Grafik Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari) tahun 2017-2020

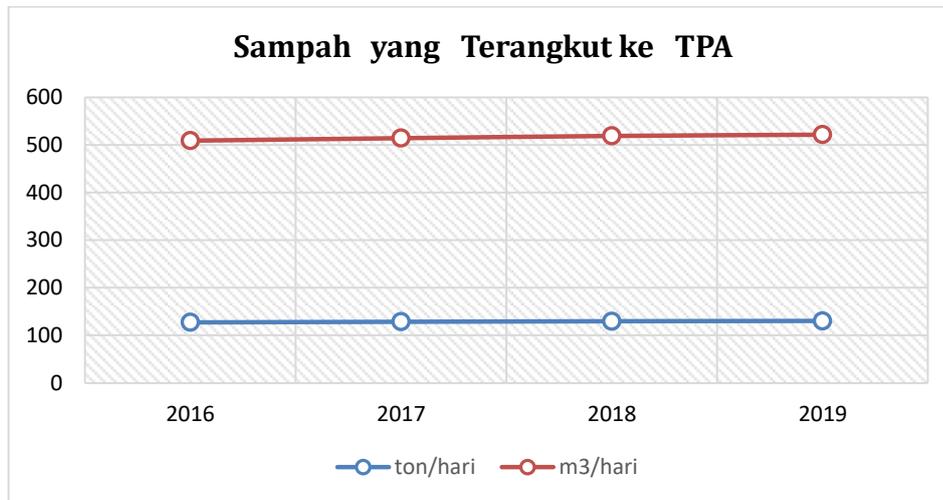


Sumber: *sipsn.menhk.go.id*

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan timbulan sampah dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Tahun 2017 jumlah timbulan sampah sebesar 152,36 /hari, pada tahun 2018 jumlah timbulan sampah meningkat sebesar 278,44 ton/hari, pada tahun 2019 jumlah timbulan sampah meningkat sebesar 5,04 ton/hari, dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 5,05 ton/hari, sehingga timbulan sampah mencapai 440,89 ton/hari.

Seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat akan berakhir pada tempat pembuangan sampah akhir yakni TPA. TPA Tanjungrejo menjadi satu-satunya tempat pembuangan sampah akhir dari segala penjuru daerah di Kabupaten Kudus. Berikut data sampah yang terangkaut ke TPA tahun 2016-2019.

Gambar 1.2.
Grafik Jumlah Sampah yang Terangkaut ke TPA tahun 2016-2019



Sumber : [http://kuduskab.go.id/p/154/persampahan 2017 dan Dinas PKPKLH Kabupaten Kudus tahun 2016-2019](http://kuduskab.go.id/p/154/persampahan%202017%20dan%20Dinas%20PKPKLH%20Kabupaten%20Kudus%20tahun%202016-2019)

Data diatas menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah sampah yang terangkut ke TPA dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 jumlah sampah yang terangkut ke TPA sebesar 127,25 ton / hari yang kemudian pada tahun 2017 naik sebesar 1,29 ton/hari menjadi 128,54 ton/hari. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah sampah yang terangkut ke TPA mengalami kenaikan sebesar 1,18 ton/hari menjadi 129,72 ton/hari, dan pada tahun 2019 jumlah sampah yang terangkut ke TPA mengalami kenaikan sebesar 0,66 ton menjadi 130,38 ton/hari.

TPA Tanjungrejo sendiri memiliki luas lahan sebesar 5,6 hektar. Luas lahan TPA Tanjungrejo sudah dalam kondisi *overload*, sehingga membutuhkan perluasan lahan sekitar 6 hektar yang letaknya tidak jauh dari lokasi TPA yang sekarang. Kegiatan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di TPA Tanjungrejo memiliki banyak kendala diantaranya keterbatasan anggaran, sarana, dan jumlah tenaga operasional yang ada (Wachid and Caesar, 2020). Struktur tanah di TPA

Tanjungrejo yang termasuk tanah padas menyebabkan sampah-sampah yang menghasilkan air licit tidak secara keseluruhan mengalir ke kolam licit. IPAL yang digunakan untuk mengolah air licit agar tidak mencemari aliran sungai yang mengalir ke sawah-sawah warga tidak berfungsi dengan baik karena dapat dilihat dari warna air di delapan kolam adalah sama yakni berwarna hitam pekat (infodesanews.com). Pencemaran terparah terjadi di sungai jati pasehan yang menjadi muara aliran limbah TPA, sehingga mengakibatkan banyak ikan di sungai mati. Sungai jati pasehan masih difungsikan oleh warga untuk kegiatan sehari-hari seperti mencuci dan lebih banyak difungsikan saat musim kemarau.

Keberadaan sampah dapat mencemari lingkungan dan mampu menjadi salah satu pemicu permasalahan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Kali Jaranan yang berada di Desa Prambatan Lor, Kaliwungu telah tercemar oleh limbah pabrik yang diduga berasal dari pabrik industri disekitar kawasan tersebut, baik pabrik rokok maupun pabrik tahu (Mustofa, 2019). Selain diakibatkan oleh limbah, pencemaran juga diakibatkan oleh banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan sehingga timbul lumut-lumut yang menggenangi hingga warna sungai mulai menghitam. Masih terdapat masyarakat yang secara sengaja membuang sampah tidak pada tempat yang seharusnya (Wachid and Caesar, 2020). Masyarakat juga masih belum melakukan pemilahan sampah dimana sampah masih tercampur menjadi satu salah satunya adalah warga Desa Bae (Prassojo C, Istirokhatun T, 2014). Kesadaran masyarakat yang rendah juga menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya lingkungan yang bersih dan

sehat. Tercatat 12 orang warga Kabupaten Kudus tertangkap basah membuang sampah sembarangan dengan sanksi denda sebesar Rp 200.000,00 dan kurungan selama satu bulan (Sasongko, 2019).

Pengelolaan persampahan yang dilakukan Kabupaten Kudus menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sebagai turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah. Berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Kabupaten Kudus telah memiliki Jakstrada yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan pada Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan yang dilakukan dalam pengurangan sampah tercantum dalam Pasal 17 dan 18 yang meliputi :

- a. Pembatasan timbulan sampah,
- b. Pendaur ulang, dan
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Sedangkan dalam penanganan sampah tercantum dalam Pasal 19 sampai Pasal 27 yang kegiatannya meliputi :

- a. Pemilahan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan ,dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Implementasi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus memerlukan adanya sumber daya berupa sarana dan prasarana yang memadai sebagai salah satu penunjang keberhasilan pencapaian pengelolaan sampah yang baik. Berikut data sarana dan prasarana sebagai fasilitas penunjang dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.4.

Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus

NO	JENIS SARANA	Jumlah Unit					
		2018		2019		2020	
Kondisi dan Jumlah Sarpras		Jumlah	Kondisi Baik	Jumlah	Kondisi Baik	Jumlah	Kondisi Baik
1	Truck Armroll	9	8	10	9	9	7
2	Dumptruck	29	17	30	18	23	22
3	Truck Engkel	2	0	2	0	2	2
4	Kontainer	38	23	39	24	23	23
5	Mobil tinja	2	2	2	2	1	1
6	Mobil tangki air	5	4	5	4	3	3
7	Mobil operasional	6	5	6	5	12	12
8	Tempat sampah dorong	88	72	88	72	69	67
9	Becak motor sampah	59	38	59	38	40	40
10	Becak motor sampah Pinjam Pakai Desa	87	87	87	87	92	92
11	Becak Sampah	126	104	126	104	86	86
12	Bulldozer	2	2	2	2	2	1
13	Excavator	2	2	2	2	2	1
14	TPS I (bangunan kantor)	12	12	12	12	12	12
15	TPS III (Landasan Container)	8	8	8	8	8	8
16	IPLT	1	1	1	1	1	1
17	TPA	1	1	1	1	1	1
18	Unit Pencacah sampah organik	1	1	1	1	1	1
19	Instalasi pengolah licit	1	1	1	1	1	1
20	Bangunan Pupuk Organik Granul	1	1	1	1	1	1
21	Bangunan Pengolah Biogas	1	1	1	1	1	1
22	Bangunan Gas metan	1	1	1	1	1	1
23	Bangunan Pemilah Sampah	1	1	1	1	1	1
24	Bank Sampah Unit (BSI)	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PKPLH Kabupaten Kudus

Berdasarkan data diatas, terdapat beberapa sarana prasarana yang mengalami penurunan baik secara kuantitas maupun kualitas. Beberapa diantaranya adalah mobil tangki air yang mengalami penurunan secara kuantitas dari 5 unit menjadi 3 unit. Sedangkan becak motor sampah pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah 59 unit, namun hanya 38 unit yang berada dalam kondisi baik yang kemudian jumlahnya mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 40 unit dengan kondisi baik. Adapun becak sampah pada tahun 2018 dan 2019

berjumlah 126 unit, namun hanya 104 unit yang berada dalam kondisi baik yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 86 unit dengan kondisi baik.

Dikutip dari jurnalpantura.id, jumlah armada pengangkut sampah yang ada belum memadai untuk mengangkut seluruh sampah di seluruh penjuru Kabupaten Kudus. Selain armada pengangkut sampah, dikutip dari murianews.com bahwa kebutuhan alat berat juga masih kurang. Disisi lain, kendaraan pengangkut sampah bisa mengangkut hingga 3 kali pengangkutan dalam sehari. Namun untuk lokasi sumber sampah terjauh, membuat armada hanya mampu mengangkut sampah satu kali dalam sehari.

Penelitian ini ingin melihat determinan (faktor-faktor yang mempengaruhi) implementasi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kudus.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dari sampah masih rendah karena sampah masih banyak ditemukan dibantaran sungai, salah satunya sungai Jaranan.
2. Kondisi lahan TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus yang sudah tidak mampu lagi menampung sampah masyarakat dan fasilitas perlindungan lingkungan (IPAL) yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Jumlah sarana dan prasarana yakni armada yang dimiliki dalam menunjang pengelolaan persampahan belum memadai, sehingga masih terdapat sampah-sampah yang tidak terangkut dan tidak terhitung seperti

sampah-sampah yang dibakar dan sampah yang dibuang sembarangan hingga mencemari lingkungan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan sumberdaya dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana hubungan lingkungan dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana hubungan sumber daya dan lingkungan dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan sumberdaya dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menganalisis hubungan lingkungan dengan implementasi pengelolan sampah di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menganalisis hubungan sumber daya dan lingkungan dengan implementasi pengelolaan sampah Kabupaten Kudus.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya dan menambah ilmu berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian akademisi atau referensi dalam melakukan penelitian yang bertema sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan keberhasilan dalam melaksanakan program maupun kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sejauh mana pengelolaan sampah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus, dan membuka wawasan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sehingga mampu berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian, penelitian terdahulu menjadi faktor pendukung yang digunakan sebagai tolak ukur serta pedoman bagi peneliti. Berbagai penelitian tentang pengelolaan sampah telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu.

Mantovani dan Maesaroh pada tahun 2018 telah melakukan penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus dan bisa menjadi modal desa lain atas keberhasilan Desa Jati Kulon dalam hal pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pengelolaan sampah dengan pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Jati Kulon belum merata. Meskipun belum merata, Pemerintah Desa Jati Kulon mengajak masyarakat untuk studi banding ke luar kota terkait pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah sehingga masyarakat dapat terus berinovasi dan melihat referensi dari berbagai sumber guna menciptakan produk yang baru. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pengelolaan sampah ini membuka lapangan kerja baru. Desa Jati Kulon termasuk dalam desa yang sudah mandiri dalam hal pengangkutan sampah hingga pengelolaannya dan masyarakat sudah memiliki kesadaran yang cukup akan tanggungjawab sosial dan lingkungan atas kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sendiri, terdapat faktor pendorong dan

penghambat. Faktor pendorong sendiri meliputi keinginan manusia yang semakin berubah dalam memenuhi kebutuhannya dan adanya inovasi yang memberikan peluang. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pekerjaan, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, dan bahan utama yang tidak selalu ada.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti dimana metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah kuantitatif dengan variabel terikat sumber daya dan lingkungan serta implementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai variabel bebasnya.

Murdiningsih telah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan Kota Manado sudah efektif, tetapi belum efisien. Aspek yang dilihat dalam proses implementasinya berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Aspek yang belum optimal adalah sumber daya berupa kendaraan pengangkut sampah yang kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah volume sampah yang dihasilkan setiap harinya, dan sarana umum yakni TPS yang kurang keterjangkau.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti dimana metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah kuantitatif dengan variabel terikat sumber daya dan lingkungan serta implementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai variabel bebasnya.

Pada tahun 2016, Salinding, Posumah and Palar telah melakukan penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado bertujuan untuk menganalisis keefektifan pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kinerja pemerintah (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado) dalam pengelolaan sampah di Kota Manado. Selanjutnya, perlu dilakukan pendisiplinan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah agar penanganan sampah bisa efektif dan efisien. Selain itu, terdapat beberapa kendala lain seperti adanya rasa tidak puas masyarakat terhadap pelayanan akan sampah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan sanksi tegas apabila terbukti melanggar perda yang berlaku.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti dimana metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah kuantitatif dengan variabel terikat sumber daya

dan lingkungan serta implementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai variabel bebasnya.

Izza Khulfa telah melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul Pengeolaan Sampah dan Alternatif-Alternatif Pilihan Publik (Studi Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bojonegoro) bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan sampah dan alternatif-alternatif pilihan publik di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan di beberapa wilayah aktivitas relatif padat, dinilai masih kurang karena keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, peranan masyarakat secara aktif untuk mandiri dan pemerintah sebagai fasilitator sangat dibutuhkan.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti dimana metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah kuantitatif dengan variabel terikat sumber daya dan lingkungan serta implementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai variabel bebasnya.

Wachid and Caesar pada tahun 2020 telah melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belum adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan

terhadap masyarakat terkait kebijakan peraturan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus. Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus terkendala oleh anggaran dan peralatan pengolah sampah yang terbatas. Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi hanya sebagai formalitas karena tidak terdapat tindak lanjut disetiap tahunnya.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti dimana metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dan fokus penelitian pada pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah kuantitatif dengan variabel terikat sumber daya dan lingkungan serta implementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai variabel bebasnya.

Pada tahun 2018, Krisnawansyah *dkk* telah melakukan penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle di Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Solok saat ini masih terkendala beberapa masalah, antara lain layanan sampah masih belum menjangkau seluruh masyarakat. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah tahun 2015 hanya sebesar 6% dengan jumlah sampah terangkut sebesar 34,632 m³/hari. Hasil observasi lapangan menunjukkan kinerja pengelolaan sampah belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana pada sistem pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Solok berkewajiban melakukan pengembangan ke arah yang lebih baik

dengan memfasilitasi partisipasi masyarakat terhadap pengolahan sampah 3R melalui infrastruktur yang memadai dan pembuatan payung hukum yang jelas agar masyarakat merasakan peranan pemerintah daerah Kabupaten Solok.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti dimana metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah kuantitatif dengan variabel terikat sumber daya dan lingkungan serta implementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai variabel bebasnya.

1.6.2. Administrasi Publik

John M. Pfiffner dan *Robert V. Presthus* dalam Inu Kencana Syafiie (2006:23) mendefinisikan administrasi publik sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Selanjutnya, Administrasi Publik didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Inu Kencana Syafiie (2006:24) administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Sedangkan menurut Arifin Abdurachman, Administrasi Publik merupakan ilmu yang mempelajari pelaksanaan perpolitikan suatu negara.

Edward H. Litchfield (dalam Inu Kencana Syafiie, 2006:25) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai sebuah studi mengenai

bagaimana badan-badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaga manusianya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

George J. Gordon dalam Inu Kencana Syafii (2006:25) menyatakan bahwa Administrasi Publik adalah rangkaian proses yang dilakukan organisasi atau perseorangan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan pengadilan.

Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (dalam Inu Kencana Syafii, 2006:25) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

Dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan seluruh kegiatan dalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan publik baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi.

1.6.3. Paradigma Adiministrasi Publik

Nicholas Henry dalam Yeremias T. Keban (2014:31-33) menyatakan bahwa terdapat 6 paradigma dalam administrasi negara yakni :

1) Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1962)

Frank J. Goodnow dan Leonard Urwick yang merupakan tokoh dalam paradigma ini, dalam tulisannya yang berjudul "*Politics and Administration* ", mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda:

Pertama, fungsi politik dimana pemerintah harus memusatkan perhatiannya pada pembuat kebijakan/ekspresif kehendak rakyat. Kedua, fungsi administrasi dimana pemerintah memberikan perhatiannya kepada pelaksanaan kebijakan/implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Paradigma ini lebih menekankan pada aspek lokusnya yaitu birokrasi pemerintahan.. Sedangkan fokus atau pengembangan metode dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

2) Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Tokoh paradigma ini adalah Willoughby, Gullick, dan Urwick. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip administrasi sebagai fokus administrasi yang tertuang dalam POSDCOB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). Prinsip administrasi tersebut bersifat universal sehingga bisa ditemukan dan berlaku kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian, paradigma ini lebih menekankan pada fokus daripada lokusnya.

3) Administrasi Negara/Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada masa ini terdapat anggapan bahwa administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari ilmu politik, yang kemudian diibaratkan dua mata uang dengan dua muka. Proses administrasi negara banyak menerima masukan dari politik, dan sebaliknya. Tokoh pada masa ini adalah Herbert Simon. Gerakan ini bersifat mundur, sehingga muncul batasan-batasan

dalam administrasi negara dengan lokus pada birokrasi pemerintahan. Masa ini merupakan masa dimana terjadi peninjauan kembali hubungan konseptual administrasi negara dengan politik, sehingga terdapat banyak tulisan mengenai administrasi negara yang dikaitkan dengan ilmu politik. Selain itu, terdapat tulisan yang hanya membahas mengenai penekanan terhadap satu wilayah kepentingan, bahkan menjadi sinonim dengan ilmu politik. Lokus paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan sedangkan fokusnya menjadi kabur.

4) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada masa ini, terjadi pengembangan prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya. Fokus dari paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset dan sebagainya. Terjadi perkembangan dua arah dalam paradigma ini, yaitu berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni dengan dukungan disiplin ilmu psikologi sosial, dan berorientasi pada kebijakan publik. Fokus-fokus yang dikembangkan dianggap dapat digunakan baik dalam lingkup bisnis maupun administrasi publik, sehingga lokusnya menjadi tidak jelas.

5) Administrasi Publik baru (1970-sekarang)

Fokus dan lokus didalam paradigma ini sudah jelas, dimana fokus administrasinya yaitu teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik.

Sedangkan lokusnya sendiri yakni, permasalahan dan kepentingan publik yang berkaitan kebijakan publik.

6) *Governance* (sekarang)

Paradigma yang terakhir adalah *Governance* (sekarang). Paradigma ini memiliki istilah lain yakni “*good governance*” yang didapat melalui UNDP. Karakteristik *good governance* dari UNDP ini meliputi (Rondelli, 2007:9 dalam Yermias T. Keban,2014:38) :

1. *Participation* yakni dalam melakukan pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi perantara, setiap orang harus diberikan ruang atau kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.
2. *Rule of law* yaitu penegakan hukum secara adil termasuk hukum yang mengatur tentang HAM.
3. *Transparency* yaitu membangun keterbukaan aliran informasi sehingga semua orang yang berkepentingan dapat mengakses dengan mudah.
4. *Responsiveness* yaitu melakukan pelayanan terhadap *stakeholders* melalui institusi dan alur proses yang ada.
5. *Consensus orientation* yaitu pencapaian *consensus* umum harus melalui proses mediasi yang berdasarkan kebijakan dan prosedur, serta atas kepentingan kelompok.

6. *Equity* yaitu setiap orang memiliki peluang yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.
7. *Effectiveness and efficiency* yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat oleh institusi-institusi dan proses yang ada dengan memanfaatkan (*best use*) sumber daya secara maksimal.
8. *Accountability* yaitu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil baik oleh pemerintah, sektor publik maupun organisasi masyarakat madani (*civil society*) kepada publik dan para pemangku kepentingan.
9. *Strategic vision* yaitu memiliki pandangan atau perspektif jangka panjang terhadap pembangunan manusia yang mempertimbangkan latar belakang sejarah dan kompleksitas sosial budaya.

Penelitian ini akan menggunakan fokus dari paradigma kelima dimana fokus dan lokusnya sudah jelas. Fokus penelitian adalah determinan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sedangkan lokusnya adalah Kabupaten Kudus.

1.6.4. Kebijakan Publik

Eyston (1971:18) dalam Solichin Abdul Wahab (2015:13) merumuskan kebijakan publik sebagai “*the relationship of governmental unit to its environment*” (sebuah hubungan diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya).

Thomas R. Dye (1987:1) dalam Solichin Abdul Wahab (2015:14) mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do*

or not to do” (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

James E. Anderson (1970) dalam Sahya Anggara (2014) mendefinisikan kebijakan publik, *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”* (kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan pemerintahan dan para pejabatnya).

Lemieux (1995:7) dalam Solichin Abdul Wahab (2015:15), seorang pakar Prancis, merumuskan kebijakan publik sebagai:

“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time” (hasil dari berbagai aktivitas yang ditujukan sebagai solusi dari pada publik di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh para aktor yang memiliki hubungan terstruktur. Keseluruhan proses berlangsung secara terus-menerus).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segala tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap urusan publik untuk mencapai kesejahteraan publik.

Menurut Dunn (2004) dalam Yeremias (2014:67) terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses kebijakan yaitu :

1. Penetapan agenda kebijakan

Tahap ini merupakan tahap penentuan terhadap masalah publik yang perlu diselesaikan. Hakikat permasalahan ditentukan melalui *problem structuring*.

2. Formulasi kebijakan

Pada tahap ini, dilakukan pengidentifikasian terhadap berbagai kemungkinan kebijakan beserta dampaknya apabila kebijakn tersebut yang dipilih atau bisa disebut dengan *forecasting*.

3. Adopsi kebijakan

Tahap ini adalah tahap dimana kebijakan akan ditentukan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Penentuan akan tahap ini dapat dilakukan setelah melalui proses rekomendasi.

4. Implementasi kebijakan

Yakni tahap pelaksanaan atas kebijakan yang telah dipilih dengan mengatur dan memanfaatkan dana serta sumber daya yang ada. Proses monitoring dilakukan pada tahap ini.

5. Penilaian kebijakan

Tahap ini adalah tahap penilaian terhadap pelaksanaan proses implementasi yang dilakukan. Proses evaluasi dilakukan pada tahap ini.

Penelitian ini akan lebih berfokus pada tahap Implementasi Kebijakan karena peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

1.6.5. Teori Implementasi Kebijakan

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam Solichin Abdul Wahab (2012) memaknai implementasi sebagai pemahaman atas segala sesuatu yang terjadi setelah sebuah program dirumuskan. Hal ini menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan yakni seluruh kejadian ataupun kegiatan yang muncul setelah pedoman-pedoman kebijakan publik disahkan, baik usaha dalam mengadministrasikannya maupun menciptakan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Solichin Abdul Wahab, 2012:135) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision*” (tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan).

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan segala kegiatan dalam rangka melaksanakan hasil dari keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1.6.5.1. Pendekatan Teori Implementasi

Terdapat beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan yakni pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Masing-masing dari pendekatan tersebut memiliki model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. (Hikmat H., 2004 dalam Wibawa, 2017).

Mazmanian dan Sabatier (1986: 21-48) dalam Imronah, model implementasi kebijakan dalam tahap implementasi kebijakan terbagi menjadi dua, yakni top down dan bottom up. Kedua model ini ada disetiap proses pembuatan kebijakan. Gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down* adalah model elit, model proses dan model inkremental. Sedangkan gambaran dari model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

1. Pendekatan Top-down

Implementasi kebijakan dalam pendekatan ini dilakukan secara tersentralisir yang dimulai dari aktor tingkat pusat, dan pengambilan keputusan tingkat pusat. Pendekatan ini berdasarkan pada perspektif bahwa keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh perumus kebijakan harus dilaksanakan oleh para administrator atau birokrat. Inti dari pendekatan *top-down* adalah para pembuat kebijakan pada tingkat pusat dilaksanakan (administrator dan birokrat) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan Bottom-up

Pendekatan *bottom-up* melihat proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Model ini lebih menekankan pada fakta bahwa implementasi dilapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. (Wibawa, 2017)

Penelitian ini menggunakan pendekatan top down dimana peneliti lebih berfokus kepada pelaksana kebijakan dibandingkan dengan sasaran kebijakan. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang ada mulai dari atas atau pusat hingga bawah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1.6.5.2. Model-model Implementasi Kebijakan

Dalam Teori Implementasi, proses implementasi memiliki model-model yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis suatu program kebijakan. Terdapat beberapa model dalam studi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli yang kemudian digunakan banyak peneliti dalam proses penelitiannya.

Mazmanian dan Sabatier dalam Abdul Wahab (2015:177-178) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dianggap berpengaruh terhadap berlangsungnya proses implementasi. Analisis implementasi kebijakan publik berperan penting dalam upaya pengidentifikasian variabel-variabel yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan proses implementasi. Terdapat 16 variabel yang dipecah menjadi 3 variabel bebas dan 1 variabel tergantung.

1. Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan
 - a) Kesukaran-kesukaran teknis
 - b) Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - c) Persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
 - d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

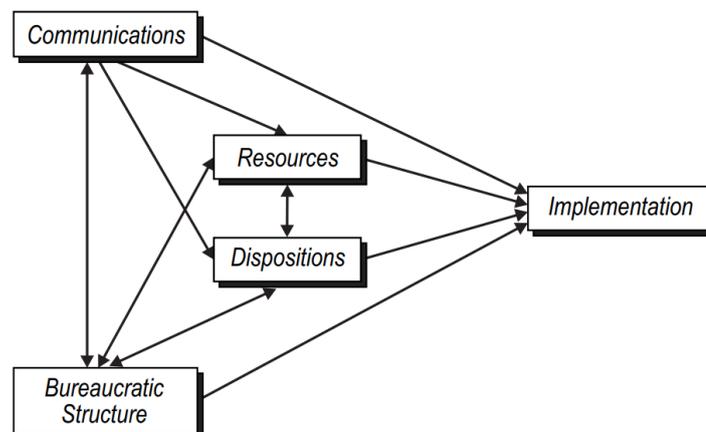
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi
 - a) Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - b) Penggunaan teori kausal yang memadai
 - c) Ketepatan alokasi sumber dana
 - d) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana
 - e) Aturan-aturan keputusan badan pelaksana
 - f) Rekrutmen pejabat pelaksana
 - g) Akses formal pihak luar
3. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi
 - a) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi
 - b) Dukungan publik
 - c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok
 - d) Dukungan pejabat atasan
 - e) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana
4. Tahap-tahap dalam proses implementasi
 - a) Output kebijakan badan pelaksana
 - b) Kesiediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan
 - c) Dampak output kebijakan secara nyata
 - d) Dampak output kebijakan sebagai dipersepsi
 - e) Perbaikan mendasar dalam undang-undang

George Edwards III (1980:1) dalam Tachjan (2006) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) *Communication* (komunikasi)
- 2) *Resources* (sumber daya)
- 3) *Dispositions* (disposisi)
- 4) *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi)

Model implementasi kebijakan menurut Edwards III dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.3.
Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edwards III



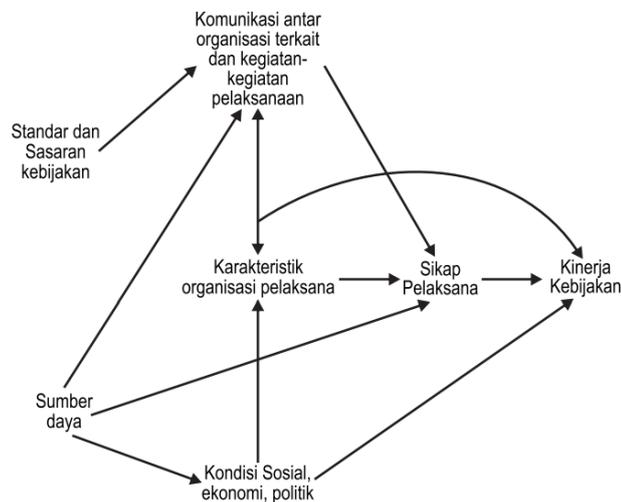
Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) dalam Tachjan (2006) menyatakan bahwa kinerja sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, yakni :

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana

- d. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. Sikap para pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn disebut sebagai *A Model of The Policy Implementation Process* yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.4.
Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn



Grindle (dalam Nugroho, 2006: 134) dalam Aneta (2010), model implementasi kebijakan ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Kebijakan yang telah ditransformasikan, kemudian implementasikan. Menurut Grindle dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementasi kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. Pelaksana program.
- f. Sumberdaya yang dikerahkan.

Sementara konteks implementasinya adalah kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa serta; kepatuhan dan daya tanggap.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat determinan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus. Determinan yang dimaksudkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus yang berupa variabel bebas (X) yakni, sumber daya dan lingkungan.

Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dan George C. Edward III karena model mereka lebih menekankan pada pendekatan top-down. Proses implementasi menurut Van Meter Van Horn dengan pendekatan *top-down* merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel (Ravik Karsidi, 2001 dalam Wibawa, 2017). Sedangkan menurut George C. Edward III, implementasi dapat dimulai melalui kondisi

abstrak dan sebuah pertanyaan mengenai syarat berhasilnya implementasi kebijakan (Rahmawati, 2020).

Model implementasi Van Meter dan Van Horn akan membantu peneliti dalam menentukan indikator variabel sumber daya yang berupa sumber daya manusia dan keuangan, dan variabel lingkungan yang meliputi sosial, politik, dan ekonomi. Sedangkan model implementasi menurut George C. Edward III akan membantu peneliti dalam menentukan indikator variabel sumber daya yang berupa sarana dan prasarana.

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan mengamati dan menganalisis variabel sumber daya dan lingkungan yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus. Model ini akan membantu peneliti dalam melihat apakah terdapat pengaruh antara sumber daya dan lingkungan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

1.6.6. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah (Variabel Y)

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis yang menyeluruh serta berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan tujuan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan atas dasar asas tanggungjawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, kemanan, dan asas nilai ekonomi.

Pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dilakukan berdasarkan Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan perda tersebut dibagi menjadi dua yakni pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan dalam pengurangan sampah sendiri meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan dalam penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Menurut Riant Nugroho (2012: 707-710), untuk mencapai keefektifan implementasi kebijakan maka terdapat 5 prinsip yang harus dipenuhi yakni :

a) Tepat Kebijakan

Kebijakan dinilai tepat apabila kebijakan tersebut dapat memberikan solusi terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Apakah kebijakan yang ada telah dirumuskan berdasarkan karakter masalah yang ingin dipecahkan. Apakah kebijakan yang ada dibuat oleh lembaga berwenang sesuai dengan karakter kebijakan.

b) Tepat Pelaksana

Terdapat tiga lembaga sebagai implementor kebijakan yakni, pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

c) Tepat Target

Ketepatan target yang dimaksud adalah kesesuaian target yang diintervensi yang telah direncanakan atau tidak tumpang tindih dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kemudian kesiapan target untuk diintervensi, dan apakah implementasi kebijakan yang diintervensi bersifat baru atau memperbarui

d) Tepat Lingkungan

Lingkungan disini dibagi menjadi dua yakni, lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik.

e) Tepat Proses

Ketepatan proses dalam hal ini terdiri dari 3 proses yaitu *Policy Acceptance*, dimana publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Kedua, *Policy adoption* dimana publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Ketiga, *Strategic Readiness* dimana public siap untuk melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan pemerintah siap menjadi pelaksana kebijakan.

Ripley dan Franklin (1982:232) dalam Subadi (2013), dalam bukunya *Policy Implementation and Bureaucracy* menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat melalui 3 dimensi yaitu (1) kepatuhan

(*compliance*), (2) lancarnya rutinitas fungsi (*smoothly and Bureaucracy*), dan (3) terwujudnya dampak kinerja yang dikehendaki (*desired performance in and impacts*). Berikut penjelasannya :

a. Kepatuhan

Kesuksesan sebuah implementasi kebijakan diukur dari tingkat kepatuhan terhadap aturan atau pedoman umum yang didukung oleh kebijakan tersebut. Kepatuhan terhadap isi kebijakan merupakan unsur penting dan harus dimiliki oleh seluruh aparat/birokrat yang terlibat.

b. Lancarnya rutinitas fungsi

Kesuksesan implementasi kebijakan ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi, demi tercapainya tujuan organisasi.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada tingkat kinerja dan dampak/manfaat yang dikehendaki dari kebijakan tersebut. Ripley dan Franklin mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan terbagi menjadi dua bagian yakni terwujudnya kinerja kebijakan dan dampak kebijakan. Terwujudnya kinerja kebijakan diartikan sebagai pencapaian hasil implementasi dalam kurun waktu pendek, sedangkan terwujudnya dampak kebijakan diartikan sebagai pencapaian hasil implementasi dalam waktu panjang.

Sehingga indikator yang akan digunakan dalam mengukur implementasi kebijakan pengelolaan sampah selain berpedoman pada regulasi yakni Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, juga pada teori implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho dalam mencapai keefektifan implementasi dan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Dalam penggunaan kedua teori implementasi kebijakan tersebut, peneliti tidak akan mengambil secara keseluruhan dari kedua teori tersebut untuk dijadikan indikator dalam mengukur menilai implementasi kebijakan pengelolaan sampah, akan tetapi peneliti hanya akan mengambil beberapa diantaranya yang sesuai dengan fokus peneliti dalam penelitian ini yakni pada pelaksana. Maka indikator dalam Implementasi Pengelolaan Sampah yang digunakan yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan teori implementasi menurut Riant Nugroho dan menurut Ripley dan Franklin. Pada teori implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho, peneliti akan menggunakan tepat kebijakan dan tepat pelaksana. Sedangkan pada teori implementasi menurut Ripley dan Franklin, peneliti akan menggunakan kepatuhan, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

1.6.7. Sumber Daya (Variabel X_1)

Sumber daya diartikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya juga dapat dikatakan sebagai sebuah komponen ekosistem

berupa barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Menurut Grima dan Berkes (1989) sumber daya adalah aset pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia.

1.6.7.1. Sumber Daya Manusia

Menurut Werther dan Davis (dalam Sutrisno 2013) sumber daya manusia adalah pegawai yang siap siaga dan mampu mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ukuran yang digunakan tidak sekedar kuantitas namun juga kualitas. Kekurangan staf akan menimbulkan persoalan didalam implementasi kebijakan yang efektif dan kurangnya personil yang ahli akan menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaruan (George Edward dalam Budi Winarno, 2008:181). Sehingga indikator sumber daya manusia dapat diukur melalui :

- a) Tingkat kecukupan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
- b) Tingkat kualitas atau kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

1.6.7.2. Keuangan

Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:34), keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap individu dan organisasi.

Dalam sebuah organisasi, keuangan membutuhkan suatu pengelolaan agar terjadi *balance* atau biasa disebut dengan manajemen keuangan. Menurut Sudana (2011) manajemen keuangan adalah penerapan prinsip-prinsip keuangan suatu

organisasi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan ketepatan pengelolaan sumber daya.

Sehingga indikatornya adalah : tingkat ketersediaan dana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

1.6.7.3. Fasilitas

Fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah kebijakan harus terpenuhi (Rahmawati, 2020). Fasilitas yang dimaksudkan disini adalah ketersediaan sarana dan prasana (Edward III dalam Rahmawati, 2020) dalam menunjang implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Indikator dari sarana dan prasana adalah :

- a) Tingkat ketersediaan jumlah sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
- b) Tingkat keterawatan (kualitas) atas seluruh jumlah sarana dan prasana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

1.6.8. Lingkungan (Variabel X₂)

Lingkungan (Iubis, 2009) dalam artikel yang dipublikasikan oleh Dea Pristatia A. Rahmadani (2014) adalah elemen-elemen yang berada di luar batas-batas organisasi, dimana berpotensi mempengaruhi sebagian ataupun keseluruhan dalam sebuah organisasi.

Lingkungan eksternal mampu menjadi salah satu komponen penilaian kinerja implementasi yang turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2016 dikutip

dalam Kerta Witaradya, 2010). Lingkungan eksternal yang dimaksud meliputi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan dalam penelitian ini dipandang melalui sudut pandang pelaksana kebijakan yakni pegawai atau staff di Dinas PKPLH dan UPT TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus. Indikator dalam mengukurnya adalah :

1. Lingkungan Sosial

- a. Tingkat karakteristik partisipan (masyarakat) terhadap pengelolaan sampah.
- b. Tingkat budaya masyarakat dalam menghadapi persoalan sampah.

2. Lingkungan Ekonomi

- a. Tingkat nilai ekonomi yang bisa di peroleh melalui implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

3. Lingkungan Politik

- a. Tingkat dukungan para elit politik terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
- b. Tingkat dukungan para pemilik kepentingan terhadap kebutuhan perluasan lahan TPA.

1.6.9. Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Pengelolaan Sampah (X₁,Y)

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebuah kebijakan, sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan, karena kehadiran manusia adalah sebagai salah satu sumber daya yang berkedudukan baik sebagai pelaksana kebijakan ataupun

sebagai pembuat kebijakan. Kemampuan, kompetensi, serta akuntabilitas harus dimiliki baik oleh pembuat kebijakan maupun oleh pelaksana kebijakan.

Selain manusia, dana dan fasilitas juga menjadi faktor penting agar implementasi dapat terlaksana sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketidakterseediaannya dana maka akan menghambat proses implementasi kebijakan karena fasilitas hadir sebagai bentuk perwujudan pengalokasian dana.

1.6.10. Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Pengelolaan Sampah (X_2, Y)

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif mampu menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan, sehingga upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. (Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa, 2017)

Sehingga lingkungan menjadi faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Perubahan lingkungan akan dapat menjadi kendala sekaligus tantangan dalam implementasi kebijakan.

1.6.11. Hubungan Sumber Daya dan Lingkungan terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah ($X_1 X_2, Y$)

Ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, uang, dan fasilitas akan sangat mempengaruhi pelaksanaan pemrosesan akhir sampah. Dukungan dari lingkungan juga akan sangat memberikan pengaruh dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Jika salah satu diantaranya tidak ada, maka kegagalan implementasi kebijakan sangat mungkin terjadi. Manusia

adalah orang yang akan menjalankan kebijakan tersebut dimana individu nya harus mempunyai kemampuan, kompetensi dan akuntabilitas yang mumpuni. Saat sumber daya manusia telah terpenuhi, dibutuhkan dana dan fasilitas dalam menunjang implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Tanpa adanya dana dan fasilitas maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah tentu akan mengalami kendala. Kemudian dalam proses pelaksanaan, faktor lingkungan juga perlu diperhatikan karena lingkungan disini bersifat dinamis sehingga sumber daya manusia yang ada harus siap akan perubahan lingkungan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Lingkungan disini juga dimaksudkan sebagai adanya kerjasama dengan stakeholders untuk mendorong terwujudnya tujuan kebijakan pengelolaan sampah.

1.7. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:93) “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, sehingga rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Hipotesis dalam penelitian ini berupa :

Ha₁ : terdapat hubungan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

Ha₂ : terdapat hubungan antara lingkungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

Ha₃ : terdapat hubungan antara sumber daya dan lingkungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

Ho₁ : tidak ada hubungan sumber daya dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

Ho₂ : tidak ada hubungan antara lingkungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

Ho₃ : tidak ada hubungan antara sumber daya dan lingkungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

1.8. Definisi Konsep

1.8.1.1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah (Variabel Y)

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah (Perda Kabupaten Kudus Nomr 4 Tahun 2017) untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang lebih sehat. Pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu keberhasilan implementasi suatu kebijakan terletak pada pelaksana kebijakan.

1.8.1.2. Sumber Daya (Variabel X₁)

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah orang (pegawai/staff) yang siap melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan menggunakan hak serta kewenangannya dengan bijak.

b. Keuangan

Keuangan adalah sumber pendapatan dan pengeluaran dalam mencapai sesuatu. Dalam penelitian ini keuangan diartikan sebagai manajemen

keuangan dimana sebuah organisasi mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mencapai tujuan organisasi.

c. Fasilitas

Fasilitas fisik menjadi hal yang penting didalam proses implementasi kebijakan. Meskipun jumlah pegawai atau staf terpenuhi serta kualitas yang dimiliki baik, namun fasilitas fisik tidak tersedia, maka akan dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan.

1.8.1.3.Lingkungan (Variabel X₂)

Lingkungan adalah semua elemen yang berpengaruh baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap jalannya sebuah organisasi. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, lingkungan eksternal juga sangat berperan terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

1.9.Definisi Operasional

1.9.1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah (Variabel Y)

Indikator yang akan digunakan dalam mengukur implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini berpedoman pada regulasi kebijakan pengelolaan sampah yakni Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, teori implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho dalam mencapai keefektifan implementasi, dan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Peneliti tidak akan mengambil secara keseluruhan dari kedua teori tersebut untuk dijadikan indikator dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah, akan tetapi peneliti hanya akan mengambil beberapa diantaranya yang sesuai dengan fokus peneliti dalam penelitian ini yakni pada pelaksana kebijakan pengelolaan sampah. Dengan demikian maka indikator yang digunakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pengurangan Sampah

1) Tingkat Pembatasan Timbulan Sampah

Pembatasan timbulan sampah dengan sampah produk yang dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, mudah diurai oleh proses alam.

2) Tingkat Pendaauran ulang Sampah

Pendaauran ulang sampah dengan bahan baku produksi yang bisa didaur ulang, dan sampah produk dan kemasan produk.

3) Tingkat Pemanfaatan kembali Sampah

Pemanfaatan kembali sampah dengan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diguna ulang.

b. Penanganan Sampah

1) Tingkat Pemilahan Sampah

Pemilahan harus berdasarkan pada pengklasifikasian sampah menjadi 5 jenis yaitu, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang

dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.

2) Tingkat Pengumpulan Sampah

Dilakukan oleh pengelola permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

- Ketersediaan TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul sampah terpilah. Dalam hal ini termasuk luas lokasi dan kapasitas, keterjangkauan lokasi, tidak mencemari lingkungan, dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

3) Tingkat Pengangkutan Sampah

- Ketersediaan alat pengangkut sampah yang tidak mencemari lingkungan.
- Jadwal pengangkutan mulai dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- Ketersediaan SPA (Stasiun Peralihan Antara).

4) Tingkat Pengolahan Sampah

Kegiatan yang dilakukan meliputi, pemadatan, pengomposan, dan daur ulang.

5) Tingkat Pemrosesan akhir sampah

- Metode yang digunakan sesuai dengan peraturan yang ada.

- Lokasi TPA (jarak dari permukiman, tidak berada pada kawasan cagar alam, dan bukan daerah banjir periode ulang 25 tahun). (Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017)
- Ketersediaan fasilitas pada TPA yakni, fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang.

1.9.2. Sumber Daya (Variabel X₁)

1.9.2.1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dalam penelitian ini diartikan sebagai pegawai yang siap melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi dimana ia berada. Indikator sumber daya manusia dapat diukur melalui :

1. Tingkat kecukupan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Kesesuaian jumlah pegawai atau staff yang ada dengan kebutuhan.
2. Tingkat kualitas sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai sesuai dengan tupoksi yang ada. Hal ini dapat dilihat melalui penempatan pegawai pada bidang-bidangnya dengan latar belakang pekerjaan dan latar belakang pendidikan.

1.9.2.2. Keuangan

Keuangan yang dimaksudkan disini adalah manajemen keuangan dimana sebuah organisasi mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik agar

dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Indikator yang digunakan adalah :

Tingkat ketersediaan dana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Kecukupan dana yang sudah pemerintah (Dinas PKPLH dan UPT TPA Tanjungrejo) peroleh untuk keberlangsungan implelementasi kebijakan pengelolaan sampah.

1.9.2.3. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan hal terpenting dalam proses implementasi kebijakan. Meskipun jumlah pegawai atau staf terpenuhi serta kualitas yang dimiliki baik, namun fasilitas fisik tidak tersedia, maka akan dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Indikator yang digunakan adalah :

1. Tingkat ketersediaan jumlah sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Berapakah jumlah sarana dan prasarana yang ada, sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan atau belum.

2. Tingkat keterawatan atas seluruh jumlah sarana dan prasana yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Perawatan dilakukan setiap berapa kali, adakah jadwal pengecekan kelayakan setiap berapa bulan sekali dalam pengoperasionalan sarana dan prasarana yang ada.

1.9.3. Lingkungan (X₂)

Lingkungan adalah semua elemen yang berpengaruh baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap jalannya sebuah organisasi. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005), lingkungan dalam implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga yakni sosial, ekonomi, dan politik.

1. Lingkungan Sosial

- a) Tingkat karakteristik partisipan (masyarakat) terhadap pengelolaan sampah.

Sejauh manakah partisipasi masyarakat untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui sikap masyarakat menghadapi persoalan sampah di lingkungannya.

- b) Tingkat budaya masyarakat dalam menghadapi persoalan sampah.

Kebiasaan masyarakat sebelum dan setelah adanya kebijakan yang berkaitan dengan penanganan sampah mulai dari pemilahan sampah. Perilaku masyarakat terhadap peraturan Bupati Kudus yakni untuk tidak menggunakan kantong plastik berbelanja sehingga masyarakat harus sedia kantong kain sendiri dan larangan penggunaan plastik pada alfamart dan indomaret, bagaimanakah respon masyarakat.

2. Lingkungan Ekonomi

- a) Tingkat nilai ekonomi yang diperoleh melalui pengelolaan sampah.

Sejauh mana masyarakat mengetahui terdapat nilai ekonomis dalam sampah apabila dikelola dengan baik. Apakah hanya sekedar tahap mengetahui tanpa ada tindakan lebih lanjut atau sudah mengetahui dan terdapat tindakan lebih lanjut melalui pelaksanaan program-program tertentu atau bahkan tidak sama sekali.

3. Lingkungan Politik

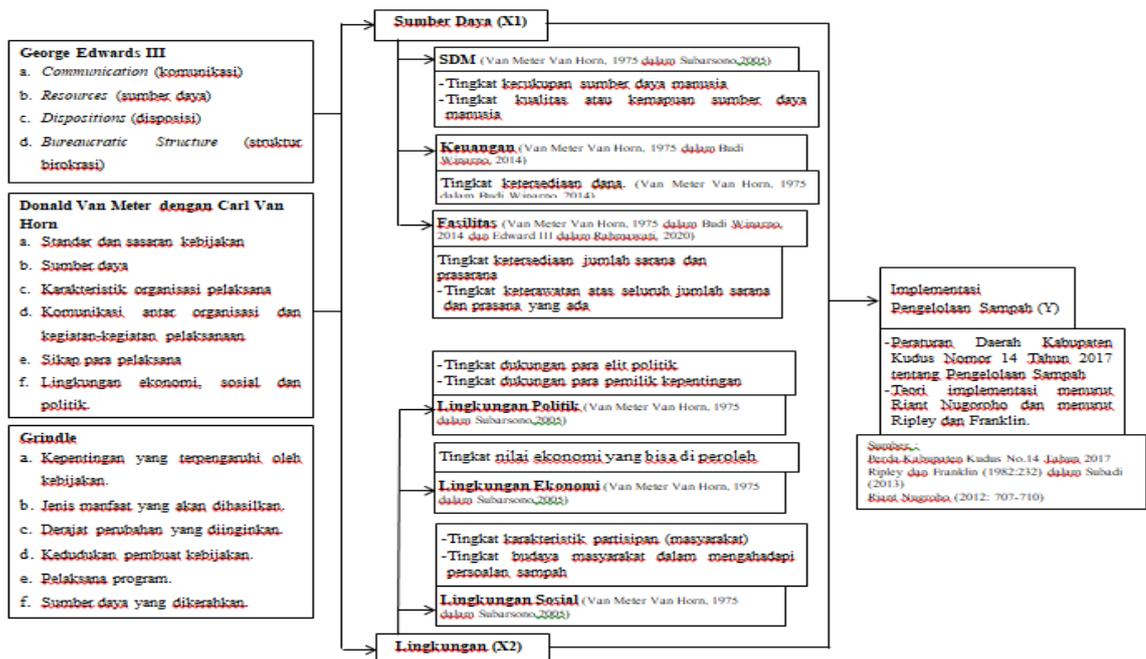
- a) Tingkat dukungan para elit politik terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Adanya kebijakan tidak akan pernah lepas dari adanya campur tangan para elit politik. Sejauh manakah keikutsertaan para elit politik dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

- b) Tingkat dukungan para pemilik kepentingan terhadap kebutuhan perluasan lahan TPA.

Pelaksanaan sebuah kebijakan tidak terlepas dari adanya kerja sama antara pemerintah dengan para stakeholders yang dapat membantu terwujudnya tujuan adanya kebijakan pengelolaan sampah. Dibutuhkan sinergi peranan antara pemerintah dan masyarakat terkait kebutuhan perluasan lahan TPA.

1.10. Kerangka Pikir Penelitian



1.11. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang memiliki kriteria tertentu yakni valid. Data yang valid pasti reliable dan obyektif, sedangkan data yang reliable belum tentu valid. Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan penelitian dibagi menjadi tiga yakni, bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan (Sugiyono, 2015:2-3).

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan perolehan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003:14). Peneliti memilih penelitian dengan pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh peneliti berupa angka serta data kualitatif yang diangkakan dan

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan ada tidaknya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya.

1.11.1. Tipe Penelitian

a. Deskriptif

Sugiyono (2011:29) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam hal ini hasil penelitian bukan untuk digeneralisasikan.

b. Eksploratif

Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru yang ada pada suatu permasalahan yang luas dan kompleks.

c. Eksplanatori

Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan apa-apa saja yang akan terjadi apabila variabel-variabel tertentu dikendalikan atau dimanipulasi dengan cara tertentu.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatori dimana dalam penelitian ini akan menguji hipotesis terhadap variabel-variabel yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

1.11.2. Populasi dan Sampel

1.11.2.1. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:215). Sedangkan Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2011:37) mendefinisikan bahwa populasi merupakan semua individu ataupun unit-unit yang menjadi target penelitian .

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah yakni Dinas PKPLH Kabupaten Kudus dan UPT Pengelola TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus.

1.11.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2011:37) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari populasi yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sedangkan Sugiyono (2013:81) mengartikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pegawai Dinas PKPLH Kabupaten dan UPT Pengelola TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus. berikut data jumlah seluruh pegawai Dinas PKPLH dan UPT Pengelola TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus.

Pegawai yang bekerja dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dibagi menjadi dua yakni pegawai teknis dan pegawai non teknis. Dikutip dari mediabpr.com, pekerja teknis merupakan pekerja yang

bertugas menangani bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional. Sedangkan pekerja non teknis adalah pekerjaan untuk mendukung kegiatan teknis biasanya berupa pekerjaan krekial atau administrasi (id.quora.com).

Responden yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah para pegawai teknis yang secara langsung turun menangani persoalan sampah dan pengelolaannya. Berikut data pegawai pengelolaan persampahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Tabel 1.5.
Data Pegawai Pengelolaan Persampahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No.	Tenaga Kebersihan	Jumlah Pegawai			Jumlah Pegawai
		PNS	PHD	Kontrak	
Kebersihan					
1.	Penyapuan	22	9	91	122
2.	Pengangkutan	33	4	17	54
3.	Pelayanan TPS	40	9	63	112
4.	Tenaga Berm	0	0	3	3
5.	Tenaga Operasional TPA	0	0	7	7
Jumlah		95	22	181	298

Sumber : Dinas PKPLH Kabupaten Kudus

Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2002:59) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat dihitung jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\begin{aligned}n &= \frac{298}{1+298 (10\%)^2} = \frac{298}{1+298 (0,1)^2} = \frac{298}{1+298 (0,01)} \\ &= 74,874 \\ &= 75\end{aligned}$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sejumlah 75 pegawai di Dinas PKPLH dan UPT TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus.

1.11.3. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2013:217), teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan untuk menentukan sampel dalam sebuah penelitian. Teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua yakni *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi *simple random sampling*, *proportional random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random*, *sampling area (cluster)*.(Sugiyono, 2015:81-82)

a. *Simple Random Sampling*

Yakni teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

b. *Proportional Random Sampling*

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari anggota populasi secara proporsional dan acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi.

c. *Proportionate Stratified Random Sampling*

Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.

d. *Disproportionate Stratified Random*

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, apabila populasi berstrata tetapi kurang proporsional.

e. *Sampling Area (Cluster)* atau Sampel Daerah

Teknik sampling ini digunakan apabila obyek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Teknik sampling ini sering digunakan melalui dua tahapan, yaitu sampel daerah dan melakukan sampling terhadap orang-orang di daerah tersebut.

Sedangkan *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana anggota populasi yang akan dipilih untuk dijadikan sampel tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, insidental, purposive, jenuh, dan snowball*.

a. *Sampling Sistematis*

Merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi berdasarkan nomor urutan yang telah diberikan.

b. *Sampling Kuota*

Sampling kuota adalah teknik pengambilan sampel dimana sampel yang akan dipilih memiliki kriteria tertentu sampai kuota yang dibutuhkan terpenuhi.

c. *Sampling Insidental*

Sampling insidental adalah teknik pengambilan sampel dengan dasar sebuah kebetulan, dimana siapapun yang secara kebetulan (incidental) bertemu dengan peneliti, sehingga dijadikan sebagai sampel apabila dirasa cocok sebagai sumber data.

d. *Sampling Purposive*

Sample purposive adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

e. *Sampling Jenuh*

Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30 orang, atau terdapat keinginan membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil dalam penelitian.

f. *Snowball Sampling*

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel dengan jumlah kecil diawal, namun membesar kemudian. Penentuan sampel dilakukan dengan cara memilih terlebih dahulu 1 atau 2 orang, akan tetapi karena dirasa belum lengkap atas data yang didapat, maka peneliti mencari tambahan orang yang dirasa dapat melengkapi data sebelumnya telah didapat, dan begitu seterusnya.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Proporsional Random Sampling*. Hal ini dikarenakan sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah para responden yang turut serta mengambil peran secara langsung (pegawai lapangan) terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

1.11.4. Jenis Data dan Sumber Data

1.11.4.1. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan instrumen yang dilakukan pada kondisi tertentu dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan karena hanya mampu menggambarkan kondisi tertentu. Data primer dapat berbentuk data kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penyajian data kualitatif bukan berupa angka tetapi kata verbal. Sedangkan penyajian data kuantitatif berbentuk angka yakni. data jumlah volume sampah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tertulis dalam buku atau laporan dan juga hasil penelitian atau laboratorium. Data sekunder biasanya bersumber dari kepustakaan dan internet. Data sekunder dapat berbentuk data kualitatif maupun kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data angka pendukung yang bersumber dari internet. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini berasal dari jurnal, artikel, ataupun buku untuk memperkuat data primer yang telah ada.

1.11.4.2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diolah suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya secara mandiri (Santoso dan Tjiptono , 2001). Data primer dalam penelitian berasal dari angket atau kuesioner dan hasil wawancara yang diolah menjadi data kuantitatif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip baik yang terpublikasikan atau tidak, dalam bentuk jadi(utuh), sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Santoso dan Tjiptono, 2001 dalam Kurniawan, 2016).

Data sekunder penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal penelitian, artikel jurnal, internet dan buku-buku.

1.11.5. Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2013:92-93) skala pengukuran merupakan acuan dalam menentukan panjang pendeknya interval yang ada didalam alat ukur, sehingga apabila alat ukur tersebut digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran ini menjadikan nilai variabel yang diukur dengan instrument tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga menjadi lebih akurat, efisien dan komunikatif. Klasifikasi skala pengukuran dibagi menjadi 3, yakni skala ordinal, skala nominal, skala interval, dan skala rasio.

1. Skala Nominal

Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah diantara skala pengukuran yang ada, dan digunakan untuk mengklasifikasikan obyek, individual atau kelompok dalam bentuk kategori.

2. Skala Ordinal

Skala ordinal disebut juga sebagai skala peringkat karena lambang-lambang bilangan hasil pengukuran didalamnya tidak hanya menunjukkan perbedaan tetapi juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik.

3. Skala Interval

Skala interval memiliki karakteristik sama seperti skala nominal dan skala ordinal yang ditambah karakteristik lain berupa adanya interval yang

tetap sehingga skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut bukan kelipatan. Skala interval sudah berupa angka dapat diterapkan langsung pada semua operasi matematika dan statistik kecuali yang berdasar pada rasio koefisien variasi.

4. Skala Rasio

Skala rasio adalah skala data kualitas tertinggi dimana terdapat semua karakteristik dari skala nominal, skala ordinal, dan skala interval ditambah dengan adanya nilai nol yang bersifat mutlak yang berarti tidak dapat mengubah nilai dasar meskipun menggunakan skala lain. Sehingga pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan mengadopsi skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut menjadi titik tolak dalam penyusunan item-item instrumen baik berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen dalam skala likert mulai dari sangat positif hingga sangat negatif, yang berupa kata-kata yakni :

1. Sangat Setuju
2. Setuju
3. Ragu-ragu
4. Tidak Setuju

5. Sangat Tidak Setuju

Dengan demikian responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban dalam skala satu sampai lima.

1.11.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.

1. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, serta dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun telepon. Wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh, sehingga instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis serta alternatif jawabannya telah disiapkan. Responden yang termasuk dalam wawancara terstruktur diberikan pertanyaan yang sama yang kemudian dicatat oleh peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono, 2015:138-140)

2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2010:145-146) mendefinisikan observasi sebagai sebuah proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua terpenting adalah proses pengamatan

dan ingatan. Observasi dilakukan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi terbagi menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.

- a) Observasi Berperan serta (*Participant observation*), yakni peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang menjadi sumber data penelitian.
- b) Observasi Nonpartisipan, yakni peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Berdasarkan instrument yang digunakan, maka observasi dibagi menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

- a) Observasi terstruktur

Observasi terstruktur merupakan observasi yang disusun secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan, dan dimana. Dalam hal ini, peneliti menggunakan instrument penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

- b) Observasi tidak terstruktur

Observasi tidak terstruktur merupakan observasi tanpa melakukan penyusunan secara sistematis apa yang akan diamati. Peneliti tidak menggunakan instrument yang baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

3. Kuesioner

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan paket pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden. Tipe dan bentuk pertanyaan atau pernyataan dapat bersifat terbuka ataupun tertutup dan dapat menggunakan bentuk kalimat positif maupun negatif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan kuesioner tertutup.

1.11.7. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2013:102) mendefinisikan bahwa instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati. Instrument penelitian digunakan untuk mencari informasi lengkap mengenai suatu masalah fenomena alam maupun sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrument angket atau kuisisioner yang di buat sendiri oleh peneliti, dan handphone atau alat perekam.

1.11.8. Validitas dan Reliabilitas

1.11.8.1. Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data obyek penelitian dengan data laporan peneliti (Hardani *et al.*, 2015). Uji validitas dilakukan untuk menguji apakah instrument yang digunakan valid (Salvandi Qito. P1). Validitas berguna untuk menunjukkan sejauhmana alat pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Diandra Gabriela Nelwan, William Agustinus Areros, 2017).

Instrumen yang valid pasti memiliki validitas yang tinggi dan sebaliknya, instrumen yang tidak valid pasti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2010:211 dalam Basyari, 2013). Perhitungan uji validitas menggunakan rumus rank Kendall tau yang menghasilkan r tabel sebesar 0,227 (Ghozali, 2005). Apabila r hitung lebih besar daripada r tabel, maka item kuisioner dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila r hitung lebih kecil daripada r tabel maka item kuisioner dinyatakan tidak valid. Hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut.

1) Variabel Sumber Daya (X1)

Hasil uji validitas pada variabel Sumber Daya atau X1 dengan 10 item pertanyaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6.
Hasil Uji Validitas Variabel Sumber Daya (X₁)

Item	Nilai Pembanding		Keterangan
	r hitung	r tabel	
X1.1	0,564	0,227	Valid
X1.2	0,620	0,227	Valid
X1.3	0,454	0,227	Valid
X1.4	0,502	0,227	Valid
X1.5	0,251	0,227	Valid
X1.6	0,490	0,227	Valid
X1.7	0,519	0,227	Valid
X1.8	0,602	0,227	Valid
X1.9	0,332	0,227	Valid
X1.10	0,514	0,227	Valid

Sumber : *Output SPSS 15*

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan sebagai indikator variabel Sumber Daya memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga dapat dinyatakan valid.

2) Uji Validitas Variabel Lingkungan (X2)

Hasil uji validitas pada variabel Lingkungan atau X2 dengan 8 item pertanyaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7.
Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan (X2)

Item	Nilai Pembanding		Keterangan
	r hitung	r tabel	
X2.1	0,621	0,227	Valid
X2.2	0,485	0,227	Valid
X2.3	0,664	0,227	Valid
X2.4	0,472	0,227	Valid
X2.5	0,445	0,227	Valid
X2.6	0,250	0,227	Valid
X2.7	0,423	0,227	Valid
X2.8	0,341	0,227	Valid

Sumber : *Output SPSS 15*

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan sebagai indikator variabel Lingkungan memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga dapat dinyatakan valid.

3) Uji Validitas Variabel Implementasi Pengelolaan Sampah (Y)

Hasil uji validitas pada variabel Implementasi Pengelolaan Sampah atau Y dengan 21 item pertanyaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8.
Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi Pengelolaan Sampah (Y)

Item	Nilai Pembanding		Keterangan
	r hitung	r tabel	
Y.1	0,300	0,227	Valid
Y.2	0,408	0,227	Valid
Y.3	0,409	0,227	Valid
Y.4	0,475	0,227	Valid
Y.5	0,617	0,227	Valid
Y.6	0,357	0,227	Valid
Y.7	0,547	0,227	Valid

Y.8	0,551	0,227	Valid
Y.9	0,442	0,227	Valid
Y.10	0,581	0,227	Valid
Y.11	0,630	0,227	Valid
Y.12	0,428	0,227	Valid
Y.13	0,438	0,227	Valid
Y.14	0,427	0,227	Valid
Y.15	0,461	0,227	Valid
Y.16	0,633	0,227	Valid
Y.17	0,684	0,227	Valid
Y.18	0,525	0,227	Valid
Y.19	0,571	0,227	Valid
Y.20	0,588	0,227	Valid
Y.21	0,437	0,227	Valid
Y.22	0,400	0,227	Valid

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan sebagai indikator variabel Implementasi Pengelolaan Sampah memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga dapat dinyatakan valid.

1.11.8.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan apakah instrument yang digunakan reliable. Reliable berarti apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2009:172 dalam Salvandi Qito. P1). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach Alpha</i>
Sumber Daya (X1)	10	0,784
Lingkungan (X2)	8	0,711
Implementasi Pengelolaan Sampah (Y)	22	0,915

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki *Cronbach alpha* lebih besar daripada 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel.

1.11.8.3. Teknik Analisis Data

a) Statistik Deskriptif dan Inferensial

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud menggeneralisasi kesimpulan. Statistik deskriptif digunakan jika peneliti ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. (Sugiyono, 2010:147)

Statistik inferensial (statistik induktif atau statistik probabilitas) merupakan teknik statistik untuk menganalisis data sampel yang hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan jika sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak. (Sugiyono, 2010:148)

b) Statistik Parametrik dan Non Parametrik

Statistik parametrik adalah statistik yang mempertimbangkan jenis distribusi data, apakah tersebar secara normal atau tidak. Analisis data yang digunakan dalam statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Apabila data yang tersebar tidak normal, maka data harus dikerjakan dengan statistik non parametrik. Jika tetap ingin dilakukan

dengan statistik parametrik maka harus melakukan transformasi data terlebih dahulu agar data mengikuti persebaran normal.

Sedangkan statistik non parametrik merupakan teknik uji yang tidak menerapkan prasyarat parameter populasi yang menjadi induk sampel penelitian. Oleh karena itu, observasi-observasi independen dan variabel yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas. Penggunaan statistik ini akan membawa konsekuensi hasil uji hipotesis tidak dapat digeneralisasikan. Kesimpulan hasil pengujian hanya berlaku untuk sampel darimana data diambil. Statistik non parametrik digunakan bila salah satu parameter statistik parametrik tidak terpenuhi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan statistik inferensial yang termasuk dalam jenis statistik nonparametrik dengan teknik korelasi *Kendall's Tau* untuk mengukur keeratan hubungan dua variabel berskala ordinal, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1.11.8.4. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan jenis variabel berskala ordinal dengan mengadopsi skala likert sehingga analisis data statistik yang digunakan sebagai berikut.

1) Rank Kendall tau (τ)

Menurut Sugiyono (2007:253) dalam Agung Wahyu Handaru dan Natlia Ajiningtyasasih korelasi Kendall tau (τ) digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, jika data

berbentuk ordinal atau rangking. Teknik ini digunakan untuk menganalisis sampel dengan jumlah anggota lebih dari 10. Berikut rumus analisis korelasi *Kendall's Tau*.

$$\tau = \frac{\Sigma A - \Sigma B}{\frac{1}{2} N (N - 1)}$$

Keterangan :

τ = Koefisien korelasi *Kendall's Tau*

ΣA = Jumlah ranking atas

ΣB = Jumlah ranking bawah

N = Jumlah anggota sampel

Hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan untuk melihat kuat lemahnya hubungan antar variabel. Berikut pedoman dalam memberikan interpretasi koefisien korelasi.

Tabel 1.10.
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2013

Pengujian hipotesis bisa dilakukan dengan membandingkan kolom Asymp Sig., dengan α (0,05) (Isna & Wardo, 2013:290 dalam Nugroho, 2020) :

- a. Jika nilai Asymp Sig., $\geq \alpha$ (0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak.

b. Jika nilai Asymp Sig., $< \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2) Koefisien Konkordansi Kendall Tau

Koefisien konkordansi kendall tau digunakan untuk mencari korelasi secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berikut rumusnya (Nugroho, 2020):

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2} K^2 (N^3 - N)}$$
$$S = \sum \left(R_j - \frac{\sum R_j}{N} \right)^2$$

Keterangan :

W = koefisien korelasi konkordansi kendall

S = jumlah kuadrat deviasi

K = banyaknya variabel

N = banyaknya sampel

R_j = jumlah rangking yang diberikan

Setelah hasil uji konkordansi kendall didapat, maka dilakukan uji signifikansi menggunakan rumus berikut :

$$x^2 = k(N - 1)W$$

Keterangan :

x^2 = uji signifikansi

k = banyaknya variabel

N = banyaknya sampel

W = koefisien konkordansi kendall

3) Koefisien Determinasi

Rumus untuk menghitung koefisien determinasi (KD) adalah :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 maka menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat dan jika nilai koefisien determinasi mendekati 0 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah (Nawari, 2010 dalam spsstatistik.com).

Dalam penelitian ini teknik analisis data dimulai dengan analisis deskriptif yang dapat berupa tabel, grafik, diagram, gambar dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian teknik-teknik statistik untuk menguji hipotesis. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Kendall tau (τ) karena jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 pegawai di Dinas PKPLH Kabupaten Kudus dan UPT TPA Kabupaten Kudus.